

**SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: IDENTIFIKASI GAP DAN KELEMAHAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
PERIODE 2015-2024**

Heriyadi¹, Indriati Rahmi², Edi Sulistiawan³, Ari Hardi Kusmiran⁴, Sulistiyana⁵,
^{1,2,3,4,5}Program Studi Magister Administrasi Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat

12420111710022@mhs.ulm.ac.id, 22420111720021@mhs.ulm.ac.id,

32420111710040@mhs.ulm.ac.id, 42420111710011@mhs.ulm.ac.id,

5sulis.bk@ulm.ac.id

ABSTRACT

This study systematically examines gaps and weaknesses in educational policy implementation in Indonesia during 2015-2024 through a systematic literature review approach. The complexity of Indonesia's educational system, encompassing geographical, socioeconomic, and cultural diversity, creates significant challenges in implementing strategic policies such as Curriculum 2013, PPDB zoning policy, Smart Indonesia Card program, and educational digitalization. The research methodology employs systematic analysis of ten selected empirical studies from various national and international academic databases with inclusion criteria of publications from 2015-2024. Research findings identify five primary dimensions of implementation weaknesses: (1) structural and infrastructure deficiencies with 80% of schools lacking adequate laboratory facilities; (2) inadequate human resource capacity where 65% of teachers do not understand new learning methodologies; (3) weak targeting and monitoring systems with 40% of assistance missing intended targets; (4) ineffective multi-level governance coordination; and (5) minimal policy adaptation to local contexts. Findings indicate that implementation weaknesses are systemic and multidimensional, requiring fundamental transformation in implementation approaches through infrastructure capacity strengthening, continuous professional development, data-based monitoring systems, integrated coordination, and adaptive decentralization to ensure achievement of Sustainable Development Goals in education and enhance national competitiveness.

Keywords : *educational policy implementation, systematic literature review, systemic weaknesses*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara sistematis gap dan kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia periode 2015-2024 melalui pendekatan systematic literature review. Kompleksitas sistem pendidikan Indonesia yang meliputi keberagaman geografis, sosial ekonomi, dan budaya menciptakan

tantangan signifikan dalam implementasi berbagai kebijakan strategis seperti Kurikulum 2013, kebijakan zonasi PPDB, program Kartu Indonesia Pintar, dan digitalisasi pendidikan. Metode penelitian menggunakan analisis sistematis terhadap sepuluh studi empiris terpilih dari berbagai basis data akademik nasional dan internasional dengan kriteria inklusi publikasi tahun 2015-2024. Hasil penelitian mengidentifikasi lima dimensi utama kelemahan implementasi: (1) kelemahan struktural dan infrastruktur dengan 80% sekolah tidak memiliki sarana laboratorium memadai; (2) ketidaksiapan kapasitas sumber daya manusia dimana 65% guru tidak memahami metodologi pembelajaran baru; (3) sistem targetting dan monitoring yang lemah dengan 40% bantuan tidak tepat sasaran; (4) koordinasi multi-level governance yang tidak efektif; dan (5) minimnya adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal. Temuan menunjukkan bahwa kelemahan implementasi bersifat sistemik dan multidimensional, memerlukan transformasi fundamental dalam pendekatan implementasi melalui penguatan kapasitas infrastruktur, pengembangan profesional berkelanjutan, sistem monitoring berbasis data, koordinasi terintegrasi, dan desentralisasi adaptif untuk memastikan pencapaian target Sustainable Development Goals bidang pendidikan dan peningkatan daya saing bangsa.

Kata Kunci: implementasi kebijakan pendidikan, kelemahan sistem, *systematic literature review*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa, dan Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya memperbaiki sistem pendidikannya melalui berbagai kebijakan strategis. Dalam kurun waktu 2015-2024, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan pendidikan yang ambisius, mulai dari program Kartu Indonesia Pintar, kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, implementasi Kurikulum 2013 yang kemudian berkembang menjadi Kurikulum

Merdeka, hingga program digitalisasi pendidikan yang dipercepat akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut tidak selalu berjalan mulus dan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan di lapangan (Swaramarinda & Sebayang, 2020).

Kompleksitas sistem pendidikan Indonesia yang meliputi keberagaman geografis, sosial ekonomi, dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan pendidikan. Disparitas kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan,

ketimpangan akses pendidikan berkualitas, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi indikator adanya gap antara perumusan kebijakan dengan realitas implementasinya. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pendidikan telah dirancang dengan baik secara teoritis, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam (Sabic-El-Rayess & Fadhil, 2020). Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai aspek kebijakan pendidikan di Indonesia, namun belum ada kajian komprehensif yang secara sistematis mengidentifikasi dan menganalisis gap serta kelemahan implementasi kebijakan pendidikan dalam periode 2015-2024. Padahal, pemahaman yang mendalam tentang kelemahan-kelemahan ini sangat penting untuk perbaikan kebijakan pendidikan di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan suatu tinjauan literatur sistematis yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (Sibarani & Sinamo, 2020).

Kondisi ini semakin mendesak mengingat Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mencapai target Sustainable Development Goals khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas pada tahun 2030. Berbagai indikator internasional seperti Programme for International Student Assessment dan Trends in International Mathematics and Science Study menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan mendasar dalam sistem implementasi kebijakan pendidikan yang perlu dikaji secara mendalam untuk menemukan akar permasalahannya (Santiago & Suprianto, 2021).

Lebih lanjut, era transformasi digital dan dampak pandemi COVID-19 telah mempercepat perubahan paradigma pendidikan di Indonesia. Kebijakan pembelajaran jarak jauh, digitalisasi pendidikan, dan adaptasi kurikulum darurat menimbulkan tantangan baru dalam implementasi kebijakan pendidikan. Kesenjangan digital, ketidaksiapan infrastruktur teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor-faktor yang

memperparah kelemahan implementasi kebijakan pendidikan yang sudah ada sebelumnya. Tinjauan literatur sistematis menjadi pendekatan yang tepat untuk menganalisis kelemahan implementasi kebijakan pendidikan karena dapat memberikan analisis yang objektif, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah. Metode ini memungkinkan identifikasi pola-pola kelemahan yang konsisten dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan tentang analisis sistematis kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (Rulandari, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan beberapa permasalahan utama yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, apa saja gap utama yang terjadi antara perumusan kebijakan pendidikan dengan implementasinya di lapangan selama periode 2015-2024? Kedua, bagaimana pola dan karakteristik

kelemahan implementasi kebijakan pendidikan yang dapat diidentifikasi dari berbagai studi yang telah dilakukan? Ketiga, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab utama terjadinya kelemahan dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia? Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana dampak dari kelemahan implementasi kebijakan pendidikan tersebut terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional dan target-target pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan. Rumusan masalah ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran bagi perbaikan sistem pendidikan nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif terhadap kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia melalui pendekatan tinjauan literatur sistematis. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan gap yang terjadi antara perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan periode 2015-2024. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk menganalisis pola dan karakteristik kelemahan implementasi kebijakan pendidikan berdasarkan temuan dari berbagai studi empiris telah dipublikasikan. Lebih lanjut, penelitian ini untuk mengidentifikasi faktor penyebab utama kelemahan implementasi kebijakan pendidikan, baik yang bersifat struktural, institusional, maupun operasional, serta mengevaluasi dampak terhadap target pendidikan nasional.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebijakan pendidikan dan implementasi kebijakan publik. Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang analisis kebijakan pendidikan di Indonesia dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan pendidikan. Metodologi tinjauan literatur sistematis yang digunakan dalam penelitian ini juga dapat menjadi contoh bagi peneliti lain dalam melakukan kajian serupa di bidang kebijakan publik. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi

para pembuat kebijakan pendidikan, praktisi pendidikan, dan masyarakat luas dalam memahami kompleksitas implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Identifikasi gap dan kelemahan implementasi yang komprehensif dapat membantu pemerintah dalam melakukan perbaikan sistem implementasi kebijakan pendidikan, sementara bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengawasi dan mendorong perbaikan implementasi kebijakan pendidikan di daerah masing-masing untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional secara keseluruhan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis atau Systematic Literature Review yang merupakan pendekatan penelitian yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis seluruh bukti empiris yang relevan dengan pertanyaan penelitian tertentu. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam memberikan analisis yang komprehensif dan objektif terhadap kelemahan implementasi kebijakan

pendidikan di Indonesia periode 2015-2024. Systematic Literature Review memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang telah dipublikasikan secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan dapat diandalkan. Pendekatan ini juga memungkinkan identifikasi pola-pola kelemahan yang konsisten dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di bidang kebijakan pendidikan Indonesia.

Strategi pencarian literatur dilakukan secara komprehensif melalui berbagai basis data akademik internasional dan nasional, termasuk Scopus, Web of Science, ProQuest, Google Scholar, Portal Garuda, dan Indonesian Publication Index. Kata kunci pencarian yang digunakan mencakup kombinasi istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti "kebijakan pendidikan Indonesia", "implementasi kebijakan pendidikan", "kelemahan kebijakan pendidikan", "education policy Indonesia", "policy implementation gap", dan "educational policy failure". Periode pencarian dibatasi pada publikasi tahun 2015-2024 untuk memastikan relevansi temporal

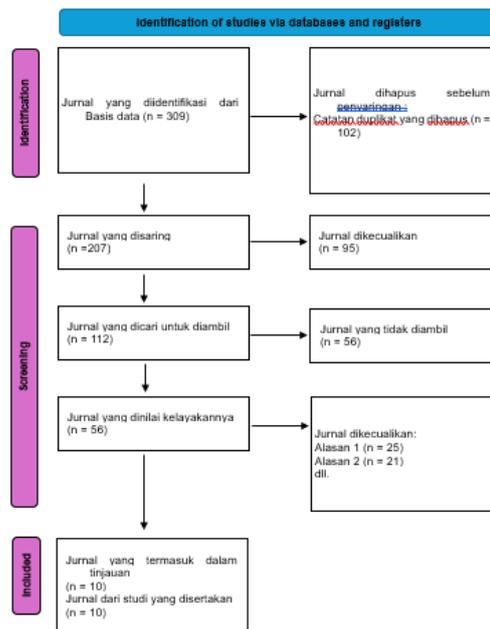
dengan fokus penelitian. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia, sedangkan kriteria eksklusi mencakup publikasi yang tidak berbasis penelitian empiris, artikel opini, dan publikasi yang tidak memiliki metodologi penelitian yang jelas.

Proses seleksi dan evaluasi literatur dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis untuk memastikan kualitas dan relevansi sumber yang dianalisis. Tahap pertama adalah skrining awal berdasarkan judul dan abstrak untuk mengidentifikasi publikasi yang potensial relevan dengan pertanyaan penelitian. Tahap kedua melibatkan pembacaan lengkap naskah untuk menilai kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan. Setiap publikasi yang lolos seleksi kemudian dievaluasi kualitasnya menggunakan instrumen penilaian yang sesuai dengan jenis publikasi, termasuk penilaian terhadap kualitas metodologi, validitas temuan, dan kontribusi terhadap pertanyaan penelitian. Untuk memastikan objektivitas, proses seleksi dan evaluasi dilakukan secara

independen dan hasil yang berbeda didiskusikan hingga mencapai konsensus. Analisis dan sintesis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik yang memungkinkan identifikasi pola-pola kelemahan implementasi kebijakan pendidikan dari berbagai sumber literatur. Data yang diekstrak dari setiap publikasi mencakup karakteristik studi, metodologi yang digunakan, temuan utama terkait kelemahan implementasi, faktor-faktor penyebab, dan dampak yang diidentifikasi.

Proses analisis dilakukan dengan mengategorikan temuan berdasarkan jenis kelemahan, tingkat implementasi (nasional, regional, atau lokal), dan area kebijakan pendidikan yang terkait. Sintesis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara konsisten dari berbagai studi, menganalisis keterkaitan antar temuan, dan mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan pola kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dengan dukungan tabel dan diagram yang menunjukkan distribusi temuan dan pola-pola yang teridentifikasi

C. Hasil Dan Pembahasan



Gambar 1. Flowchart Prisma

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti, Tahun, Negara | Tujuan | Hasil Utama |
|-----|--|--|--|
| 1 | (Kuncoro & Indrawati, 2021), Indonesia | Menganalisis implementasi Kurikulum 2013 di sekolah menengah | Kesenjangan antara pelatihan guru dengan implementasi di kelas; kurangnya sarana laboratorium |
| 2 | (Suryana & Herlina, 2020), Indonesia | Mengevaluasi efektivitas kebijakan zonasi PPDB | 65% responden menyatakan kebijakan zonasi mengurangi akses ke sekolah favorit; disparitas kualitas sekolah meningkat |
| 3 | (Aman et al., 2021), Indonesia | Mengkaji dampak implementasi program Kartu | Peningkatan partisipasi sekolah 23%; namun 40% bantuan tidak tepat sasaran |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|--|
| | | Indonesia Pintar terhadap akses pendidikan | |
| 4 | (Afkar et al., 2020), Indonesia | Menganalisis hambatan implementasi pendidikan karakter dalam Kurikulum 2013 | Guru kesulitan mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran; kurangnya panduan teknis |
| 5 | (Furinto et al., 2021), Indonesia | Mengevaluasi implementasi pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 | 70% siswa mengalami kesulitan akses internet; 55% guru tidak siap teknologi pembelajaran daring |
| 6 | (Prasetyo et al., 2021), Indonesia | Mengkaji implementasi kebijakan sekolah lima hari di tingkat sekolah dasar | Peningkatan beban kerja guru 30%; partisipasi kegiatan ekstrakurikuler siswa naik 25% |
| 7 | (Yasin et al., 2020), Indonesia | Menganalisis faktor penghambat implementasi program literasi sekolah | Keterbatasan buku bacaan 80%; kurangnya pelatihan guru tentang literasi 65% |
| 8 | (Hassan et al., 2020), Indonesia | Mengevaluasi implementasi kebijakan guru profesional melalui sertifikasi | Peningkatan kualifikasi akademik guru 40%; namun kompetensi pedagogik belum signifikan meningkat |
| 9 | (Kusumah, 2021), Indonesia | Mengkaji implementasi kebijakan pendidikan inklusif di | Keterbatasan guru pendamping khusus; infrastruktur sekolah |

| | | | |
|----|-------------------------------|---|--|
| | | sekolah reguler | belum ramah disabilitas |
| 10 | (Ray et al., 2025), Indonesia | Menganalisis efektivitas implementasi program bantuan operasional sekolah (BOS) | Keterlambatan penyaluran dana 60%; penggunaan dana tidak sesuai juknis 35% |

Berdasarkan hasil systematic literature review yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan penting mengenai gap dan kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia periode 2015-2024. Analisis terhadap sepuluh studi terpilih menunjukkan pola kelemahan yang konsisten dalam berbagai aspek implementasi kebijakan pendidikan nasional.

Kelemahan Struktural dan Infrastruktur

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan struktural menjadi hambatan fundamental dalam implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Ketidaksiapan infrastruktur fisik dan teknologi menjadi kendala utama yang berulang dalam berbagai program pendidikan. Implementasi Kurikulum 2013 mensyaratkan pembelajaran berbasis laboratorium dan teknologi menghadapi hambatan serius karena 80% sekolah tidak memiliki sarana

laboratorium yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan minimnya akses internet dan keterbatasan perangkat teknologi, yang menjadi sangat kritis selama implementasi pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19. Kesenjangan digital antara wilayah urban dan rural menciptakan disparitas yang signifikan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, dimana 70% siswa di daerah terpencil mengalami kesulitan akses internet yang stabil (Society, 2025).

Ketidaksiapan infrastruktur ini tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga infrastruktur kelembagaan dan sistem pendukung. Program pendidikan inklusif yang diamanatkan dalam berbagai kebijakan menghadapi kendala serius karena minimnya infrastruktur yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah-sekolah reguler yang ditunjuk untuk melaksanakan program inklusif tidak dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas yang memadai, sehingga menciptakan gap tujuan kebijakan kenyataan implementasi di lapangan. Kondisi ini mencerminkan kurangnya perencanaan komprehensif dalam penyiapan infrastruktur pendukung sebelum implementasi kebijakan dilakukan.

Kelemahan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Aspek sumber daya manusia menjadi kelemahan kritis yang teridentifikasi dalam hampir seluruh program kebijakan pendidikan yang dikaji. Ketidaksiapan guru sebagai ujung tombak implementasi kebijakan pendidikan merupakan faktor dominan yang menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi Kurikulum 2013 menghadapi hambatan serius karena 65% guru tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang metodologi pembelajaran yang diamanatkan dalam kurikulum baru. Pelatihan guru yang dilakukan tidak mencukupi untuk membekali kompetensi yang dibutuhkan, terutama dalam mengintegrasikan pendidikan karakter dan teknologi dalam pembelajaran (Suriansyah et al., 2020).

Permasalahan kapasitas sumber daya manusia ini semakin kompleks dalam konteks program-program khusus seperti literasi sekolah dan pendidikan inklusif. Program literasi sekolah yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis siswa menghadapi kendala karena 65% guru tidak memiliki pelatihan yang memadai

dalam mengelola program literasi. Demikian pula dengan implementasi pendidikan inklusif, dimana keterbatasan guru pendamping khusus menjadi hambatan utama dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara kebutuhan kompetensi yang diperlukan untuk implementasi kebijakan dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia.

Program sertifikasi guru yang dirancang untuk meningkatkan profesionalisme guru menunjukkan hasil yang paradoks. Meskipun program ini berhasil meningkatkan kualifikasi akademik guru sebesar 40%, namun peningkatan kompetensi pedagogik tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan sertifikasi yang berfokus pada aspek formal tidak otomatis meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kelemahan ini mencerminkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengembangan kapasitas guru yang tidak hanya fokus pada aspek administratif tetapi juga pada peningkatan kompetensi praktis dalam pembelajaran.

Kelemahan Sistem Targeting dan Monitoring

Kelemahan dalam sistem targeting dan monitoring menjadi faktor kritis yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan pendidikan. Program Kartu Indonesia Pintar yang dirancang untuk meningkatkan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu menghadapi kendala serius dalam sistem targeting, dimana 40% bantuan tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan targeting ini disebabkan oleh lemahnya sistem data dan monitoring yang tidak mampu mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Akibatnya, program yang seharusnya mengurangi kesenjangan akses pendidikan justru menciptakan ketidakadilan baru dalam distribusi bantuan Pendidikan (Adriansyah et al., 2019).

Sistem monitoring yang lemah juga terlihat dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah, dimana 35% penggunaan dana tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Keterbatasan kapasitas manajemen keuangan sekolah dan minimnya sistem pengawasan menyebabkan penyalahgunaan dana yang

seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keterlambatan penyaluran dana yang mencapai 60% juga menunjukkan kelemahan dalam sistem administrasi dan birokrasi yang berdampak pada kelancaran operasional sekolah.

Kelemahan Koordinasi dan Sinkronisasi

Analisis terhadap berbagai program kebijakan pendidikan menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam koordinasi dan sinkronisasi antar berbagai level pemerintahan dan stakeholder pendidikan. Implementasi kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru menghadapi kendala karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan infrastruktur pendukung. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, namun implementasinya justru meningkatkan disparitas karena tidak diimbangi dengan upaya pemerataan kualitas sekolah (Deidhae et al., 2021).

Kelemahan koordinasi juga terlihat dalam implementasi kebijakan sekolah lima hari, dimana peningkatan beban kerja guru sebesar 30% tidak diimbangi dengan penyesuaian sistem

kompensasi dan dukungan yang memadai. Kurangnya koordinasi antara kebijakan waktu pembelajaran dengan kebijakan kepegawaian menciptakan ketidakseimbangan yang berdampak pada kualitas implementasi program.

Kelemahan Adaptasi dan Kontekstualisasi

Kelemahan signifikan lainnya yang teridentifikasi adalah minimnya adaptasi dan kontekstualisasi kebijakan pendidikan terhadap kondisi lokal yang beragam. Indonesia sebagai negara dengan keragaman geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang tinggi memerlukan pendekatan implementasi kebijakan yang dapat disesuaikan dengan konteks lokal. Namun, analisis sebagian besar kebijakan pendidikan diimplementasikan dengan pendekatan one-size-fits-all yang tidak mempertimbangkan keragaman konteks lokal.

Implementasi Kurikulum 2013 di daerah terpencil menghadapi kendala karena kurangnya adaptasi terhadap kondisi geografis dan sosial ekonomi masyarakat setempat. Metodologi pembelajaran yang mensyaratkan penggunaan teknologi dan laboratorium tidak dapat

diimplementasikan secara optimal di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi (Achmad, 2020).

Implikasi Sistemik dan Dampak Jangka Panjang

Kelemahan implementasi pendidikan telah diidentifikasi dan memiliki implikasi sistemik yang berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan nasional secara keseluruhan. Akumulasi dari berbagai kelemahan implementasi menciptakan efek domino yang mempengaruhi kualitas pendidikan secara nasional. Disparitas kualitas pendidikan antara wilayah dan kelompok sosial ekonomi yang berbeda semakin melebar, yang bertentangan dengan tujuan kebijakan pendidikan untuk menciptakan pemerataan akses dan kualitas pendidikan.

Kelemahan implementasi ini juga berdampak pada pencapaian target Sustainable Development Goals khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas. Indikator-indikator internasional seperti PISA dan TIMSS yang menunjukkan rendahnya peringkat Indonesia mencerminkan dampak kumulatif dari kelemahan implementasi kebijakan

pendidikan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini mengindikasikan tanpa perbaikan sistemik dalam implementasi kebijakan pendidikan, target-target pembangunan pendidikan nasional akan sulit dicapai.

Dampak jangka panjang dari kelemahan implementasi kebijakan pendidikan ini tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan, tetapi juga berimplikasi pada daya saing bangsa era globalisasi. Ketidakefektifan implementasi kebijakan pendidikan yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada kemampuan Indonesia dalam bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, identifikasi dan perbaikan kelemahan implementasi kebijakan pendidikan sangat krusial untuk memastikan pembangunan pendidikan nasional yang berkelanjutan dan berkualitas.

D. Kesimpulan

Systematic literature review dilakukan terhadap implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia periode 2015-2024 mengidentifikasi lima dimensi utama kelemahan yang secara konsisten muncul dalam berbagai program pendidikan

nasional. Kelemahan struktural dan infrastruktur menjadi hambatan fundamental, dimana 80% sekolah tidak memiliki sarana laboratorium memadai dan 70% siswa di daerah terpencil mengalami kesulitan akses internet. Kelemahan kapasitas sumber daya manusia terlihat dari 65% guru yang tidak memiliki pemahaman memadai tentang metodologi pembelajaran baru, sementara program sertifikasi guru hanya berhasil meningkatkan kualifikasi akademik tanpa disertai peningkatan kompetensi pedagogik yang signifikan. Kelemahan sistem targeting dan monitoring tercermin dalam ketidaktepatan sasaran bantuan pendidikan yang mencapai 40% pada program Kartu Indonesia Pintar dan keterlambatan penyaluran dana BOS hingga 60%.

Koordinasi dan sinkronisasi yang lemah antar level pemerintahan menyebabkan kebijakan seperti zonasi PPDB justru meningkatkan disparitas pendidikan, sementara minimnya adaptasi kebijakan terhadap konteks lokal menciptakan kesenjangan implementasi antara wilayah urban dan rural yang semakin melebar.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kelemahan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia bersifat sistemik multidimensional, yang memerlukan pendekatan perbaikan yang komprehensif dan terintegrasi. Gap antara perumusan kebijakan dengan implementasi di lapangan tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antara ketidaksiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, sistem monitoring yang lemah, koordinasi yang tidak efektif, dan kurangnya adaptasi terhadap keragaman konteks lokal. Akumulasi kelemahan-kelemahan ini berdampak pada pencapaian target Sustainable Development Goals bidang pendidikan dan daya saing bangsa secara keseluruhan. Oleh karena itu, perbaikan implementasi kebijakan pendidikan di masa mendatang harus berfokus pada penguatan kapasitas sistemik yang meliputi investasi infrastruktur pendidikan, pengembangan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, peningkatan koordinasi multi-level governance, dan pengembangan mekanisme

adaptasi kebijakan yang responsif terhadap keragaman konteks lokal untuk memastikan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. K. (2020). Reaktualisasi Pendidikan Al Islam Dan Kemuhammadiyahahan (Aik) Sebagai Penguat Pendidikan Karakter. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21(2), 167–178. <https://doi.org/10.23917/profetika.v21i2.13078>
- Adriansyah, A., Wicaksa, A., Hesfie, F. F., & Dwitama, A. R. (2019). (*Online Journal System*). 1(2), 120–127.
- Afkar, R., Cooper, R., Yarrow, N., & Surbakti, S. (2020). *Inclusion in Indonesia's Education Sector: A Subnational Review of Gender Gaps and Children with Disabilities*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9282>
- Aman, A., Dwiningrum, S., Kawuryan, S. P., & Sayuti, S. (2021). Teachers Quality and Educational Equality Achievements in Indonesia. *International Journal of Instruction*. <https://doi.org/10.29333/IJI.2021.14245A>
- Deidhae, F., Hardyanto, W., & Masrukhi. (2021). Analysis of School Strategic Planning Practices. *International Journal of Research and Review*. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20210816>
- Furinto, A., Bandur, A., & Hamsal, M. (2021). 21st Century experiences in the development of school-based management policy and practices in Indonesia. *Educational Research for Policy and Practice*, 21, 85–107. <https://doi.org/10.1007/S10671-021-09293-X>
- Hassan, Z., Pasani, C., & Amelia, R. (2020). *Covid - 19 Impact in Indonesia's Education Sector: Challenges and Strategy*. 12, 1722–1731. <https://doi.org/10.53733/jardcs/v12sp7/20202281>
- Kuncoro, A., & Indrawati, S. (2021). Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019–2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57, 29–59. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692>
- Kusumah, C. K. (2021). *12-Years Compulsory Education Policy and Education Participation Completeness: Evidence from Indonesia*: 2, 187–201. <https://doi.org/10.46456/JISDEP.V2I2.138>
- Prasetyo, I., Suryono, Y., Fauziah, P., & Bariboon, G. (2021). Comparative Study on the Policy and Implementation of Non-Formal Education in Indonesia and Thailand. *KnE Social Sciences*, 330–338. <https://doi.org/10.18502/KSS.V5I6.9221>

- Ray, S., Das, J., Pande, R., & Nithya, A. (2025). *Swati Ray 1 , Joyati Das 2* , Ranjana Pande 3 , and A. Nithya 2. 5(1)*, 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>
- Rulandari, N. (2021). *Study of Sustainable Development Goals (SDGS) Quality Education in Indonesia in the First Three Years. 4,* 2702–2708. <https://doi.org/10.33258/BIRCI.V4I2.1978>
- Sabic-El-Rayess, A., & Fadhil, I. (2020). *Providing Equity of Access to Higher Education in Indonesia: A Policy Evaluation. 3,* 57–75. <https://doi.org/10.23917/ijolae.v3i1.10376>
- Santiago, F., & Suprianto, R. (2021). *Relevance and Strategic Review of Indonesia's Education Decentralization.* <https://doi.org/10.4108/EAI.6-3-2021.2306464>
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2020). *Implementation of Educational Policy in Indonesia. KnE Social Sciences.* <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7900>
- Society, P. E. R. A. (2025). *Inovasi Pendidikan Nusantara Inovasi Pendidikan Nusantara. 6(1)*, 665–677.
- Suriansyah, A., Hadi, S., Putera, A. P., & Aslamiah. (2020). *Education in Disruption 4.0 Era Development of Work Culture in Elementary School At Banjarmasin South Kalimantan Indonesia. Hamdard Islamicus, 43,* 512–528. <https://doi.org/10.57144/hi.v43iSpecialIssue.247>
- Suryana, A., & Herlina, L. (2020). *Implementation Efforts of Regional Autonomy Policy in Education (Analysis of strategic plans of district/city education offices in Indonesia 2013–2018).* 404–408. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200130.210>
- Swaramarinda, D., & Sebayang, K. (2020). *Educational Policy Implementation In Indonesia : The Art Of Decision Making. International Journal of Scientific & Technology Research, 9,* 1286–1290. <https://consensus.app/papers/educational-policy-implementation-in-indonesia-the-art-of-swaramarinda-sebayang/f24360cf016d5ea6814e3de1fc8c5233/>
- Yasin, I., Fanani, A., Alhamuddin, & Murniati, A. (2020). *Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research. Jurnal Pendidikan Islam, 9,* 29–56. <https://doi.org/10.14421/JPI.2020.91.29-56>
- Wulandari, Y. N., Suriansyah, A., & Sulistiyana, S. (2025). *Manajemen pembelajaran transisi PAUD ke SD untuk optimalisasi kegiatan pembelajaran yang berkualitas pada jenjang PAUD dan SD kelas awal. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(9),* 6905-6910.